

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Implementasi

2.1.1 Implementasi

Implementasi secara sederhana diartikan sebagai tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain implementasi berupa proses yang terjadi setelah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu.

Menurut Meter dan Horn dalam (Budi Winarno (2012 : 149) :

“membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Sementara itu, Edward III dalam (Leo Agustino (2016 : 136-137) mengemukakan bahwa:

“yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan”.

Menurut Lester dan Stewart Jr dalam (Leo Agustino (2016 : 129) mengemukakan bahwa : “implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir”.

Sementara itu, menurut Ripley dan Franklin dalam (Budi Winarno, 2012 : 148) bahwa :

“implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan, pertama badan-badan pelaksana oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber ini meliputi personal, peralatan, lahan tanah bahan-bahan mentah dan uang, kedua badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program, ketiga badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau batasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan, pembayaran, batasan-batasan tentang kegiatan ataupun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program”.

Implementasi kebijakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kegiatan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. dalam (Leo Agustino, 2017 : 143) mengatakan bahwa :

“Implementasi kebijakan sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan implementasi dapat dinilai dari proses dan pencapaian tujuan akhir (outcome), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan yang diraih”.

Marille Gerindle dalam buku (Leo Agustino, 2017 : 144)

mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan yaitu :

“Implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada section program dari *individual project*, dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Pemahaman yang lebih kopherensif mengenai para implementasi, secara khusus mengarahkan perhatian kepada enam kelompok variabel yang mencakup perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan mempengaruhi pemberian pelayanan publik, yakni dengan menunjukkan elevansi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dasar, sumber-sumber kebijakan, komunikasi terorganisasi dan kegiatan-kegiatan, karakteristik-karakteristik dari badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial politik yang mempengaruhi yuridiksi dan organisasi pelaksana untuk melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan, pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan atau tidak diharapkan.

2.2. Tinjauan Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Secara umum “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-

pembicaraan yang biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik.

Batasan tentang kebijakan publik oleh Thomas R. Dye dalam (Budi Winarno, 2012 : 20) yang menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose dalam (Budi Winarno, 2012 : 20) berpendapat bahwa :

“kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”

Pandangan lain diberikan oleh Carl Friedrich dalam (Budi Winarno, 2012 :20) menyatakan bahwa :

“memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Eulau dan Prewitt (dalam Agustino, 2016:17) mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dicirikan oleh konsistensi dan

pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang memenuhi keputusan tersebut.

Sementara itu, Nugroho (dalam Mulyadi, 2016:165) menjelaskan bahwa :

“kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita ditempuh”.

2.2.2 Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar pada kejelasan ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keragaman dari ukuran dasar dan dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Budi Winarno (2012:159), identifikasi dan indikator-indikator kinerja merupakan tahap krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan

tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Untuk menjelaskan apakah implementasi telah berhasil atau tidak, perlu ditentukan jumlah pekerjaan yang diciptakan, identitas orang-orang yang dipekerjakan dan kemajuan proyek-proyek pengembangan yang berhubungan.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan.

2.3. Tinjauan Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah (Perda) adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan penjelasan atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling intens dalam proses kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan diatas meja pejabat. Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi faktor penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi kebijakan merujuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya disebut dengan pihak implementor, kelompok sasaran.

Implementasi pada isi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*outcome*), karena tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar di aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran

kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama proses implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno 2012 : 149) membatasi Implementasi Kebijakan sebagai berikut :

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Pendapat yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn diatas diartikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2012 : 158) Implementasi kebijakan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran

dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

2. Sumber – Sumber Kebijakan. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan. Sangat penting untuk member perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.
4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.
6. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*). Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Oleh karena itu, para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak

individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam.

Dalam proses implementasi kebijakan, sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pelaksana, lebih dari itu menyangkut jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang secara berlangsung maupun tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada giliran berikutnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (*intended impact*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover / negative effect*).

Adapun tahap-tahap dalam proses implementasi yaitu :

1. Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksana;
2. Keputusan dari kelompok sasaran terhadap keputusan dimaksud;
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan hukum pelaksana;
4. Persepsi terhadap dampak keputusan dimaksud;
5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang yakni berupa perbaikan mendasar dalam konteksnya.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kebijakan adalah “upaya memahami apa yang senyatanya terjadi yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul dari tindakan-tindakan individu/pejabat atau swasta dalam usaha mengadministrasikan dalam peningkatan pendapatan daerah.

2.3.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pemerintah kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau

tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Teori Edwards (Budi Winarno, 2012 : 177), dalam teori ini dinyatakan bahwa ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni :

1. Komunikasi
2. Sumber – Sumber
3. Kecenderungan – Kecenderungan
4. Struktur Birokrasi

Komunikasi, terdiri atas :

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (*miscommunication*), hal tersebut karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-beremacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua), ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi konsisten dan jelas (untuk diterapkan), karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah, maka menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Kemudian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi implementasi yang tidak konsisten berawal dari semakin besarnya kepentingan yang berusaha bersaing yang berusaha mempengaruhi implementasi kebijakan dan keadaan seperti ini akan mendorong kemungkinan perintah-perintah implementasi tidak konsisten

Sumber – Sumber, terdiri atas :

1. Staf, sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf, jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil, hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.
2. Informasi, dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk yaitu : Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai

data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, akan besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Sumber-sumber implementasi kebijakan adalah sumber-sumber kebijakan yang sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

Kecenderungan – Kecenderungan, terdiri atas :

1. Pengangkatan birokrasi, kecenderungan-kecenderungan para pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang menjadi persoalan adalah personil yang tidak melaksanakan kebijakan-keibijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
2. Insentif, menurut Edwards salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi isentif. Oleh karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembentuk kebijakan, dan kemungkinan besar mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan pemerintah dengan baik.

Beberapa kebijakan dapat digolongkan kedalam “zona ketidakacuhan” para administrator. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan, kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana, dan disinilah terdapat kecenderungan-kecenderungan yang menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Budi Winarno, 2012 : 205) berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yaitu :

Pertama, birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrument sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik. *Kedua*, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap. *Ketiga*, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. *Keempat*, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. *Kelima*, birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi. *Keenam*, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik dengan melakukan *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *Fragmentasi*. *SOP* adalah suatu kegiatan rutin yang

memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan / Administrator / Birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan, pelaksana *Fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan pegawai diantara beberapa unit kerja.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, agar struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi lebih efektif, karena adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga-lembaga Negara yang efektif.

2.4. Tinjauan Program Cirebon Satu Data

2.4.1 Definisi Program Cirebon Satu Data

Program Cirebon Satu Data adalah Portal Data Statistik Sektor di Kota Cirebon sebagai komitmen Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik untuk mewujudkan Cirebon *Smart City*. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu / kejadian / kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan /atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Forum Cirebon Satu Data adalah

wadah komunikasi dan koordinasi antara Instansi Pusat dan /atau Instansi Daerah lainnya untuk penyelenggaraan Cirebon Satu data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Cirebon Satu Data direpresentasikan sebagai suatu konsep tata kelola data Pemerintah Daerah Kota yang menggunakan sistem pengolah data terpadu guna menyediakan data statistik dan informasi *geospasial* sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota yang akurat, mutakhir dan mudah diakses oleh pengguna data untuk mendukung pembangunan Daerah Kota.

Koordinator Forum mempunyai tugas menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Cirebon Satu Data, Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan kegiatan harian dari Forum Cirebon Satu Data. Walidata mempunyai tugas melakukan identifikasi dan menyusun kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Forum Cirebon Satu Data, memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dari Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Indonesia, menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Cirebon Satu Data dan yang terhubung ke Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan memberikan hak akses kepada Pengguna Data atas kuasa dari Wali Kota sebagai penanggung Jawab Cirebon Satu Data.

Produsen Data mempunyai tugas menghasilkan Data berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dan Prinsip Cirebon Satu Data, mengumpulkan Data hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan statistik dan informasi geospasial, menyusun daftar Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan Standar Data yang berlaku, dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas Data yang dikumpulkan sesuai dengan Standar Data yang berlaku melalui kegiatan verifikasi dan validasi.

Penyelenggaraan Cirebon Satu Data berada dibawah Wali Kota selaku Penanggungjawab Forum Cirebon Satu Data. Data Pemerintah Daerah Kota meliputi seluruh data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan /atau Instansi lainnya di wilayah Daerah Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon ini dapat dijadikan media dalam rangka mencapai dan memenuhi data yang terintegrasi yang dirancang secara efisien, mudah, dan dinamis.



Sumber: Dashbord Cirebon Satu Data